

Realisasi anggaran penanganan COVID-19 Kubu Raya 50,47 persen



Sumber gambar : <https://kalbar.antaranews.com>

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) Yusran Anizam mengatakan realisasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 hingga 15 Juli 2021 mencapai 50,47 persen dari total anggaran sebesar Rp57,47 miliar (Rp57.469.115.573).

"Sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat setiap daerah harus mengalokasikan anggarannya untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19," kata Yusran di Sungai Raya, Kamis.

"Kita di Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari DAU sudah kita alokasikan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya dalam penanggulangan COVID-19 sebesar Rp57,47 miliar," lanjut Yusran.

Dia menjelaskan, rinciannya antara lain untuk penanganan COVID-19 dari Rp39.211.163.834 terealisasi Rp20.675.400.175 atau 52,73 persen, dukungan vaksinasi Rp7.499.955.612 terealisasi Rp3.832.393.524 atau 51,10, intensif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 Rp5.944.905.000 terealisasi Rp3.900.337.251 atau 65,61 persen, belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp4.813.091.127 terealisasi Rp565.040.880 atau 11,74 persen.

"Alhamdulillah sampai sekarang ini, tenaga kesehatan kita tidak ada kendala terkait pelaksanaan tanggung jawab terhadap perolehan hak mereka. Tentunya semua itu sudah sesuai dengan arahan pak Bupati Muda Mahendrawan selaku Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Kubu Raya yang harus dilakukan maksimal dan efektif dengan sistem 'kepong bakol' yang mana semua elemen bergerak, mulai dari tingkat RT, Dusun, Desa dan Kecamatan dalam penanganan COVID-19," tuturnya.

Yusran menuturkan, secara umum kondisi COVID-19 di Kabupaten Kubu Raya masih berada di zona orange. Saat ini, Pemkab Kubu Raya terus melakukan penanganan secara maksimal, bahkan rumah-rumah isolasi yang ada di desa dan kecamatan masih belum terisi.

"Memang sesuai dengan inovasi dari arahan dan kebijakan dari pak bupati, penanganan kesehatan ini sejalan dengan program Selasa- Jum'at (Salju) Terpadu yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Yang mana tenaga kesehatan melakukan jemput bola dengan turun langsung ke masyarakat memantau dan pendampingan terkait pelayanan kesehatan," katanya.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/479730/realisasi-anggaran-penanganan-covid-19-kubu-raya-5047-persen>
2. <https://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1122618/sekda-kubu-raya-hingga-15-juli-realisasi-anggaran-covid-19-capai-50-47-persen>

Catatan Berita:

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 2 ayat (2), terdapat pengaturan sebagai berikut:**
Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19
2. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan ekonomi di daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, agar Pemerintah Daerah:
 - a. *Melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama:*

- 1) Untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
- 2) Perlindungan sosial; dan*
- 3) Pemulihan ekonomi;*
- b. Memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;*
- c. Mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel; dan*
- d. Mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun*